

Katalog :4301002.73

STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016

<http://suisel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016

<http://sulsel.bps.go.id>

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016

ISBN :
Katalog : 4301002.73
Nomor Publikasi : 73520.1703
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : vii + 47 halaman
Naskah : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung Jawab Umum : Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- Penanggung Jawab Teknis : Kabid. Statistik Sosial
- Koordinator : Kasi. Statistik Kesejahteraan Rakyat
- Anggota : Staf Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting : Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

KATA PENGANTAR

Publikasi dengan judul "**Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2016**" ini merupakan publikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2016, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Pendidikan di Sulawesi Selatan secara umum.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bagian, yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka buta huruf, penduduk yang tidak bersekolah lagi, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penyajian publikasi ini di susun secara deskriptif dalam bentuk narasi, ulasan singkat, dan grafik yang berbasis gender, serta dilampirkan tabel-tabel pendukung untuk menunjang informasi.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, Juni 2016
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala,



Nursam Salam, SE

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Sumber Data	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. Metodologi	6
2.1. Ruang Lingkup	6
2.2. Kerangka Sampel	7
2.3. Rancangan Sampel	7
2.4. Metode Pengumpulan Data	8
2.5. Pengolahan Data	8
BAB III. Konsep dan Defenisi	9
BAB IV. Pembahasan	12
4.1. Angka Partisipasi Sekolah	13
4.1.1. Angka Partisipasi Sekoah (APS) PAUD	13
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SLTP Dan SLTA	15
4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP Dan SLTA	19
4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP Dan SLTA	23
4.2. Angka Buta Huruf	26
4.3. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi	32
4.4. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	33
4.5. Fasilitas Pendidikan Dan Jumlah Siswa	34
4.6. Rasio Murid/Siswa Terhadap Sekolah Dan Guru	40
BAB V. Penutup	46

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Penduduk Usia 5-6 Tahun Yang Pernah/Sedang Sekolah Menurut Tingkat Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2016	15
Tabel 2. Angka Partispasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2016	17
Tabel 3. Angka Partispasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2016	21
Tabel 4. Angka Partispasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2016	24
Tabel 5. Persentase Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca Dan Menulis, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2016	29
Tabel 6. Persentase Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas Yang Buta Huruf Menurut, Golongan Umur Dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2016	31
Tabel 7. Persentase Penduduk usia 7-18 Tahun Menurut Partispasi Sekolah, Tipe Daerah Dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan 2016	33
Tabel 8. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2016	36
Tabel 9. Jumlah Pendidik Menurut Tingkat Pendidikan Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2016	37
Tabel 10. Jumlah Murid/Siswa Menurut Tingkat Pendidikan Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2016	39
Tabel 11. Rasio Murid/Siswa Terhadap Sekolah Tingkat SD, SLTP, SLTA Dan SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2016	41

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 12. Rasio Siswa/Murid Terhadap Guru Tingkat SD, SLTP, SLTA Dan SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2016	43
Tabel 13. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD, SLTP, SLTA Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2016	45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	16
Gambar 2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTA dan SLTA Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016	23
Gambar 3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	28
Gambar 4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	30
Gambar 5.	Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Dan Jensi Kelamin Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	32
Gambar 6.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jensi Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	34
Gambar 7.	Rasio Murid/Siswa Terhadap Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ...	40
Gambar 8.	Rasio Murid/Siswa Terhadap Guru Tingkat SD, SMP, SMA/SMK Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ...	42
Gambar 9.	Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ...	44

BAB I

PENDAHULUAN



1. 1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan dibidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat "**MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA**".

Pada umumnya, pendidikan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (meliputi SD dan SMP atau sederajat), pendidikan menengah (meliputi SMA dan SMK, atau sederajat), dan pendidikan tinggi (strata dan non strata).

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin,1996:24). Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Disamping sarana dan prasarana pendidikan, seperti jumlah sekolah, serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait.

Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi. Terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antar penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan, disamping kultur sosial dan budaya yang berbeda antar daerah juga masih cukup kuat memberi warna

terhadap kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah daerah Sulawesi Selatan, mengingat Sulawesi Selatan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga hanya mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Sulawesi Selatan bersaing dalam tataran global.

Dalam publikasi ***"Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2016"*** ini disajikan data pendidikan yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016 berupa rangkuman beberapa indikator pendidikan.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

1. 2. TUJUAN

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini, antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan.
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

1. 3. SUMBER DATA

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor tahun 2016. Susenas merupakan survei triwulanan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak diseluruh Indonesia. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, sampelnya tersebar di sembilan kabupaten/kota yang mencakup seluruh kecamatan baik wilayah perkotaan dan perdesaan.

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini tersusun dalam 5 (lima) bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika;

- BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.
- BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.
- BAB IV. PEMBAHASAN, meliputi Angka partisipasi Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Putus Sekolah, Penduduk Tidak Sekolah, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
- BAB V. PENUTUP

BAB II

METODOLOGI



Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016. Data yang digunakan dalam publikasi ini merupakan sampel dari kegiatan Susenas Maret 2016. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. RUANG LINGKUP

Susenas 2016 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 300.000 rumah tangga yang tersebar dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah sampelnya sebanyak 13.840 rumah tangga, tersebar dalam 1.384 blok sensus¹ di wilayah perkotaan dan perdesaan. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

¹Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

2.2. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan blok sensus terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus daerah perkotaan/perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan/perdesaan di setiap kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk 2010 (SP2010). Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil *update* daftar hasil SP2010 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P.

2.3. RANCANGAN SAMPEL

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016 dilaksanakan setiap triwulanan. Data yang dikumpulkan triwulanan selama setahun akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota.

Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap. **Tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *Probability Proportional to Size (PPS)² – Linear Systematic Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil *listing* di setiap blok sensus hasil Sensus Penduduk 2010. **Tahap kedua**, dari sejumlah rumah tangga hasil *update* di setiap blok sensus terpilih dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling³*.

²*Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu desain pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

³*Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pendidikan terakhir.

2.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan, dilakukan mulai dari pengolahan manual (prakomputer) yang meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (*batching*), pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (*data entry*), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.

BAB III KONSEP DAN DEFINISI



Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

Sekolah adalah sekolah formal maupun non formal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah (*play group* dan taman kanak-kanak), kursus-kursus (mengetik, komputer, bahasa dan sejenisnya), kursus kedinasan (Seskoad, Diklatpim IV, III, II, Lemhanas) dan kejar paket A, B, atau C sebagai sekolah nonformal.

Seseorang dikatakan ***sedang/masih bersekolah*** apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. ***Aktif mengikuti pendidikan*** maksudnya bahwa ia secara fisik mengikuti pelajaran di kelas, termasuk yang tidak mengikuti pelajaran di kelas tetapi diperbolehkan mengikuti ujian.

Jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1. *Jenjang pendidikan dasar***, meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau yang sederajat, serta Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat.
- 2. *Jenjang pendidikan menengah***, meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat.
- 3. *Jenjang pendidikan tinggi***, meliputi semua pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan menengah. Terbagi dalam dua jalur;

Program Gelar (Strata atau disebut juga Jalur Akademik), yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian akademik mengenai penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi mencakup pendidikan sarjana muda (S0), sarjana/strata-1 (S1), strata-2 (S2), dan strata-3 (S3)

Program Non Gelar (Non Strata atau disebut juga Jalur Profesional), yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Program ini pada umumnya adalah program pendidikan diploma yang meliputi Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) atau setara dengan sarjana muda dan Diploma IV (DIV) atau setara dengan sarjana.

Status pendidikan adalah keadaan seseorang/penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi:

1. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.
2. **Masih bersekolah** adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.
3. **Tidak bersekolah lagi** adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Penduduk dikatakan ***mampu baca tulis*** jika dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Orang buta yang dapat membaca huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.

<http://sulses.bps.go.id>

BAB IV

PEMBAHASAN



Dalam menyusun indikator pendidikan, indikator-indikator diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan, yaitu (1) pendidikan umum, (2) pendidikan masyarakat, dan (3) pendidikan kedinasan. Oleh karena sebagian besar sumber data publikasi ini berasal dari susenas, maka dalam ulasannya hanya mencoba menguraikan tentang pendidikan umum saja. Berhubung makna pendidikan umum kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka indikator yang diidentifikasi berlaku untuk:

1. Jenjang pendidikan dasar yang meliputi pendidikan Prasekolah, pendidikan Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah, SDLB dan SD Terpadu).
2. Pendidikan menengah yang meliputi menengah pertama umum/Madrasah Tsanawiyah maupun kejuruan dan menengah lanjutan umum/Madrasah Aliyah maupun kejuruan.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi Universitas, Institut, Sekolah tinggi maupun Akademi.

Gambaran tentang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dengan beberapa indikator pendidikan. Ada empat indikator utama yang sering digunakan. Pertama, Angka Partisipasi Sekolah bagi penduduk usia sekolah 7-18 tahun (SD hingga SLTA), sebagaimana harapan pemerintah bahwa penduduk usia tersebut adalah penduduk yang dijadikan sasaran utama pembangunan bidang pendidikan. Kedua, Angka Buta Huruf (ketidakmampuan baca tulis penduduk) penduduk usia 15 tahun atau lebih, diharapkan pada kelompok umur tersebut penduduk sudah dapat membaca dan menulis. Ketiga, Angka Anak Putus Sekolah dengan mencoba melihat gambaran anak yang berada pada kelompok usia pendidikan 7-18 tahun tetapi

kondisi mereka dalam keadaan tidak aktif bersekolah. Dan keempat, Angka Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berupa persentase penduduk yang minimal tamat SLTA, diharapkan dengan lulus SLTA penduduk sudah memiliki kualitas yang cukup memadai untuk bersaing dipasar kerja. Empat indikator utama bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 diuraikan seperti berikut ini.

4.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai

program pengembangan anak. Bila syarat-syaraf motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi, ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, *play group*, kelompok bermain, tempat penitipan anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton -1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2016, menunjukkan bahwa angka partisipasi PAUD (5-6 tahun) di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 41,70 persen. Angka partisipasi PAUD di Sulawesi Selatan tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup serius terhadap anak usia dini di Sulawesi Selatan. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 5-6 tahun, lebih dari 41 orang yang sudah mengikuti pendidikan. Ini berarti pemahaman orang tua sudah mulai berkembang akan pentingnya pendidikan pada anak usia dini.

Dilihat dari Paritas Gender (PG) yang merupakan selisih antara penduduk laki-laki terhadap perempuan, terlihat bahwa nilai PG partisipasi PAUD Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar -2,19 persen. Ini menandakan persentase anak perempuan umur 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan lebih banyak dibandingkan anak laki-laki diusia yang sama. Indikator kesenjangan lainnya adalah Indek Paritas Gender (IPG) yang merupakan perbandingan capaian penduduk perempuan terhadap laki-laki. Pada tahun 2016, IPG Sulawesi Selatan menunjukkan nilai 1,05 persen yang berarti angka kesetaraan gender di Sulawesi Selatan berada sudah di atas ambang batas kesenjangan gender, yaitu persentase perempuan yang sekolah PAUD pada usia 5-6 tahun lebih banyak dibandingkan persentase laki-laki.

Tabel 1
 Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2016

Kabupaten/Kota	Ya, pernah/sedang Sekolah			PG	IPG
	L	P	L+P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	36,42	46,33	41,57	-9,91	1,27
Bulukumba	33,70	22,57	28,07	11,14	0,67
Bantaeng	37,52	35,98	36,69	1,55	0,96
Jeneponto	19,19	18,77	18,98	0,42	0,98
Takalar	43,96	29,30	38,47	14,66	0,67
Gowa	29,61	52,41	40,20	-22,80	1,77
Sinjai	55,22	66,74	61,04	-11,53	1,21
Maros	43,82	34,41	38,73	9,42	0,79
Pangkep	33,72	47,60	40,36	-13,88	1,41
Barru	44,20	43,81	43,99	0,39	0,99
Bone	50,01	48,75	49,30	1,26	0,97
Soppeng	54,15	71,52	63,39	-17,37	1,32
Wajo	63,36	71,47	67,19	-8,10	1,13
Sidrap	51,18	80,61	65,19	-29,43	1,58
Pinrang	51,47	34,52	43,57	16,95	0,67
Enrekang	51,75	52,76	52,13	-1,01	1,02
Luwu	31,04	24,67	28,04	6,37	0,79
Tana Toraja	24,57	39,61	31,94	-15,04	1,61
Luwu Utara	24,76	24,86	24,80	-0,10	1,00
Luwu Timur	44,06	54,52	50,22	-10,46	1,24
Toraja Utara	23,11	23,76	23,50	-0,65	1,03
Makassar	44,69	40,94	42,82	3,75	0,92
Parepare	43,85	34,81	39,23	9,04	0,79
Palopo	39,94	24,60	33,21	15,34	0,62
SULSEL	40,61	42,80	41,70	-2,19	1,05

Sumber: Susenas 2016

4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP Dan SMA

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SLTA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

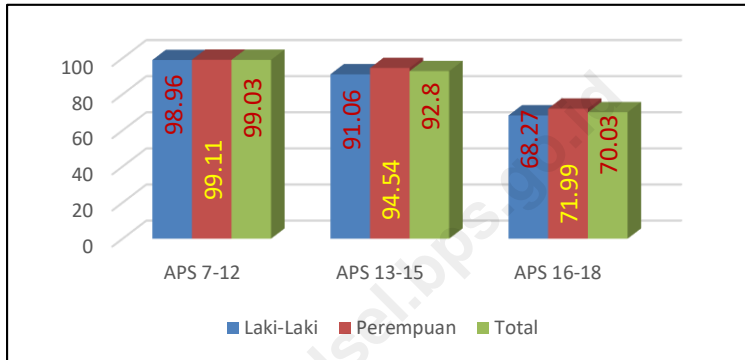
$$APS \text{ SD} = \left(\frac{\text{Penduduk usia 7 - 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APS SMP} = \left(\frac{\text{Penduduk usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APS SMA} = \left(\frac{\text{Penduduk usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2015 dan menggunakan formulasi diatas dapat disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber: Susenas 2016

Pada Gambar 1 terlihat bahwa APS SD mendekati 100 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada jenjang pendidikan SLTP (13-15 tahun) baru mencapai 92,80 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SLTA (16-18 tahun), angka APS baru mencapai 70,03 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan. Artinya, pandangan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan sudah semakin terkikis.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, Tabel 2 dibawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terjadi di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Tabel 2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin,
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	APS 7-12			APS 13-15			APS 16-18		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Selayar	98,43	99,29	98,84	91,72	100,00	95,79	61,87	63,08	62,28
Bulukumba	99,20	98,18	98,73	87,69	95,13	91,70	80,50	72,58	76,66
Bantaeng	98,58	98,67	98,62	90,24	94,10	92,20	65,97	56,11	60,97
Jeneponto	98,59	100,00	99,25	90,22	87,89	89,06	59,85	50,12	55,44
Takalar	98,02	100,00	98,97	85,00	95,10	89,96	63,77	60,30	61,95
Gowa	99,21	100,00	99,53	91,27	96,01	93,75	68,46	76,57	72,70
Sinjai	100,00	98,97	99,50	91,83	91,79	91,81	77,80	86,73	82,13
os	99,39	99,19	99,29	96,13	96,59	96,37	67,65	74,49	71,15
Pangkajene Dan Kepulauan	98,65	100,00	99,26	89,53	89,85	89,69	56,83	70,99	63,67
Barru	98,15	100,00	98,99	91,03	100,00	96,20	70,79	85,98	77,29
Bone	98,95	99,74	99,34	87,46	96,91	91,85	65,30	63,47	64,46
Soppeng	98,58	97,08	97,88	94,35	95,53	94,96	63,03	75,02	69,12
Wajo	96,96	98,17	97,60	84,07	84,86	84,52	51,61	64,84	56,97
Sidenreng Rappang	98,95	96,53	97,68	85,06	98,03	91,21	66,82	62,89	65,08
Pinrang	97,63	100,00	98,74	91,54	95,67	93,69	57,43	68,93	63,71
Enrekang	100,00	100,00	100,00	100,00	98,20	99,10	80,29	94,63	86,85
Luwu	99,42	100,00	99,71	88,98	97,44	93,23	65,55	70,56	68,01
Tana Toraja	99,53	99,44	99,49	93,15	98,24	95,26	60,66	78,20	69,00
Luwu Utara	99,61	99,24	99,41	93,47	93,25	93,37	61,87	66,90	64,33
Luwu Timur	100,00	100,00	100,00	96,90	97,28	97,07	71,52	85,76	79,40
Toraja Utara	99,20	99,49	99,34	95,78	100,00	97,71	79,19	86,91	82,49
Makassar	98,85	97,74	98,29	92,41	91,71	92,05	75,68	71,89	74,06
Parepare	99,28	100,00	99,64	88,54	96,73	92,33	67,92	84,20	76,45
Palopo	100,00	100,00	100,00	95,14	98,35	96,57	85,33	91,24	88,41
SULSEL 2016	98,96	99,11	99,03	91,06	94,54	92,80	68,27	71,99	70,03
2015	99,11	98,95	99,03	91,46	93,90	92,66	68,05	71,34	69,66

Sumber:
Susenas 2016

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 Tahun

Secara umum, angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-12 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. APS Sulawesi Selatan tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 99,03 persen. Jika dilihat lebih rinci menurut kabupaten/kota, APS usia 7-12 tahun seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2016 mencapai lebih dari 97 persen. Bahkan APS Kabupaten Enrekang, Luwu Timur dan Kota Palopo mencapai 100 persen. Tingginya angka APS di Sulawesi Selatan ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun sebagai upaya untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup berhasil.

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun capaiannya tidak secemerlang APS pada tingkat SD meskipun mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. APS Sulawesi Selatan tahun 2016 masih berada di angka 93 persen. APS Sulawesi Selatan tahun 2015 sebesar 92,66 persen sedikit meningkat menjadi 92,80 persen di tahun 2016. Pada tahun 2016 pada umumnya APS kabupaten/kota mencapai lebih dari 91 persen. Namun ada 4 (empat) kabupaten yang APS-nya kurang dari 90 persen yaitu Kabupaten Jeneponto, Takalar, Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Wajo. Pencapaian APS ini tentu tidak terlepas dari program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah masing-masing daerah. Dilihat dari sisi gender, APS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua dari sisi pendidikan hampir setara antara laki-laki maupun perempuan.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun

Seiring dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, APS usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. APS Sulawesi Selatan tahun 2016 mencapai 70,03 persen atau naik sebesar 0,37 poin dibandingkan tahun 2015. Meskipun perhatian pemerintah daerah sudah cukup serius pada bidang pendidikan, namun pada kelompok umur ini, APS yang dicapai kabupaten/kota masih dikisaran 55 hingga 88 persen. Kabupaten Wajo dan Jeneponto mempunyai angka APS yang terendah yaitu 56,97 persen dan 55,44 persen. Rendahnya APS Sulawesi Selatan mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan pada tahun-tahun yang akan datang. Dilihat dari sisi gender, dari tahun ke tahun APS usia 16-18 tahun untuk perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki.

4.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP Dan SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SLTP, dan SLTA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SLTP} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SLTA} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SLTA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2016 dan menggunakan formulasi diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota,
 Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	APK SD			APK SLTP			APK SLTA		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Selayar	108,20	112,57	110,29	110,48	102,96	106,79	69,53	52,48	63,80
Bulukumba	108,76	109,27	108,99	72,08	94,55	84,19	92,53	76,13	84,59
Bantaeng	112,23	118,73	115,26	72,87	69,26	71,04	85,26	85,92	85,60
Jeneponto	119,25	119,49	119,36	77,32	68,44	72,90	78,76	73,31	76,29
Takalar	101,77	111,40	106,39	93,50	66,26	80,14	82,10	80,19	81,10
Gowa	111,38	111,29	111,34	76,64	69,36	72,84	90,97	112,95	102,46
Sinjai	108,67	109,11	108,89	85,50	93,29	89,46	85,41	85,66	85,53
Maros	105,74	100,94	103,46	74,83	107,13	91,76	96,05	76,32	85,96
Pangkajene Dan Kepulauan	116,56	114,66	115,70	79,25	76,00	77,59	74,42	79,17	76,72
Barru	98,26	110,84	104,00	114,30	101,03	106,66	65,10	73,85	68,84
Bone	112,78	119,41	116,03	76,03	89,68	82,38	74,94	66,46	71,04
Soppeng	103,84	100,98	102,51	84,61	81,72	83,12	77,01	90,39	83,80
Wajo	108,54	105,14	106,75	69,18	71,63	70,57	65,58	92,03	76,30
Sidenreng Rappang	115,56	104,13	109,57	83,14	86,72	84,84	73,20	72,11	72,72
Pinrang	102,93	107,09	104,87	78,41	82,00	80,28	85,92	86,96	86,49
Enrekang	109,57	108,38	108,96	98,46	101,65	100,04	92,95	86,35	89,93
Luwu	96,20	110,47	103,36	110,07	85,19	97,56	79,18	91,83	85,39
Tana Toraja	113,92	110,90	112,52	95,08	97,06	95,90	56,04	65,55	60,56
Luwu Utara	116,45	109,17	112,66	77,79	68,28	73,36	79,12	99,17	88,92
Luwu Timur	111,38	104,05	107,85	86,25	109,72	96,63	94,83	86,97	90,48
Toraja Utara	111,05	125,29	118,12	97,48	89,59	93,88	85,58	81,50	83,83
Makassar	103,82	110,82	107,30	82,29	77,23	79,68	95,52	81,91	89,69
Parepare	104,08	101,24	102,67	60,31	118,02	87,01	92,97	54,50	72,83
Palopo	115,31	107,83	111,66	79,70	94,21	86,17	100,47	90,66	95,35
SULSEL 2016	108,76	110,74	109,71	82,76	84,00	83,38	84,01	83,28	83,66
2015	111,18	111,49	111,33	85,38	85,75	85,56	78,08	77,98	78,03

Sumber: Susenas 2016

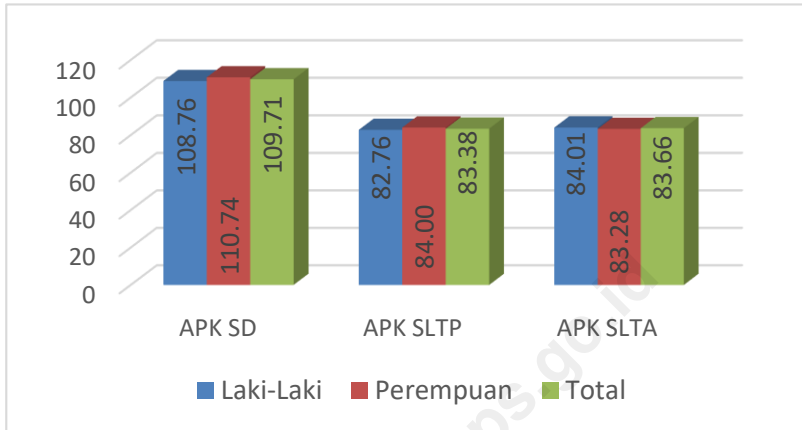
Dari tabel diatas terlihat bahwa APK SD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 sebesar 109,71 persen, yang berarti selain penduduk berumur 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan yang sama. Kondisi ini terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, APK SD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 119,36 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Soppeng (102,51 persen). Namun demikian APK SD turun dari tahun 2015 sebesar 111,33 persen menjadi 109,71 persen pada tahun 2016.

Penurunan juga terjadi pada APK SLTP yaitu dari 85,56 persen di tahun 2015 turun menjadi 83,38 persen di tahun 2016. Kabupaten Selayar, Barru dan Enrekang memiliki persentase diatas 100 persen yang berarti selain penduduk berumur 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan yang sama di kedua Kabupaten tersebut.

Penuurunan APK SD dan APK SMP tidak terjadi pada APK SMA yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 78,03 persen naik menjadi 83,66 persen atau naik sebesar 5,63 poin. Hal ini menandakan bahwa penduduk semakin berusaha untuk meningkatkan pendidikannya.

Tingginya angka APK pada jenjang pendidikan SD menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 6 tahunnya mengingat APK tidak memperhatikan umur dalam penghitungannya.

Gambar 2
 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP, dan SLTA
 Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber: Susenas 2016

4.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP Dan SLTA

Selain APS dan APK diatas, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{APM SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7 - 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SLTP} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 13 - 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SLTA} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 16 - 18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Tabel 4
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SLTP			APM SLTA		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Selayar	94,00	99,29	96,52	79,56	96,53	87,89	47,67	52,31	49,23
Bulukumba	98,84	98,18	98,53	66,55	92,42	80,49	73,97	64,60	69,43
Bantaeng	98,58	98,67	98,62	70,04	67,66	68,83	61,34	54,45	57,85
Jeneponto	97,26	100,00	98,54	67,85	63,85	65,86	52,93	43,93	48,85
Takalar	90,82	100,00	95,22	72,97	64,88	69,00	58,22	52,28	55,10
Gowa	98,32	100,00	99,00	69,80	66,76	68,21	58,70	68,62	63,88
Sinjai	100,00	98,97	99,50	70,48	85,79	78,27	64,43	72,56	68,37
Maros	99,39	86,24	93,16	71,45	78,17	74,97	61,23	54,46	57,77
Pangkajene Dan Kepulauan	98,65	99,61	99,08	69,85	72,41	71,16	45,54	63,16	54,06
Barru	91,34	96,61	93,75	77,52	86,48	82,68	42,73	60,82	50,46
Bone	98,14	97,80	97,97	71,98	78,26	74,90	58,48	48,20	53,75
Soppeng	97,65	97,08	97,38	81,50	77,04	79,20	60,74	66,44	63,63
Wajo	94,60	96,34	95,52	59,28	64,89	62,47	46,71	59,12	51,74
Sidenreng Rappang	98,15	94,54	96,26	70,94	79,70	75,09	55,21	53,34	54,38
Pinrang	97,06	98,88	97,91	71,29	75,67	73,57	50,00	59,84	55,37
Enrekang	100,00	100,00	100,00	84,54	86,40	85,47	62,88	75,49	68,65
Luwu	87,76	98,60	93,20	73,49	79,75	76,64	49,29	62,97	56,00
Tana Toraja	97,36	99,44	98,32	78,90	84,67	81,30	41,34	52,57	46,68
Luwu Utara	99,61	98,51	99,04	73,25	62,76	68,36	56,70	63,46	60,01
Luwu Timur	98,26	92,70	95,58	80,95	80,42	80,71	66,05	69,82	68,14
Toraja Utara	99,20	99,49	99,34	82,81	81,16	82,06	63,55	70,14	66,36
Makassar	93,11	96,59	94,84	68,26	71,74	70,05	70,57	60,86	66,41
Parepare	97,18	91,86	94,53	55,24	93,04	72,73	43,17	52,35	47,97
Palopo	100,00	90,52	95,37	77,50	75,52	76,61	66,80	64,73	65,72
SULSEL 2016	96,56	97,28	96,90	71,71	75,53	73,62	59,04	60,14	59,57
2015	96,11	97,60	96,84	71,21	75,90	73,51	58,62	60,35	59,47

Sumber: Susenas 2016

Pada tahun 2016, Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan di seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti terus bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

A. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2016, APM SD di Sulawesi Selatan mencapai 96,90 sedikit meningkat 0,06 poin dibanding tahun 2015. Pada Tabel 4 terlihat jelas perbedaan angka APM Sulawesi Selatan dari tahun 2016 antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan waktu, perbedaan APM SD antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di SD.

B. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP

Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 73,51 persen di tahun 2015 menjadi 73,62 di tahun 2016. Peningkatan APM SLTP ini terjadi setengah dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari sisi gender, APM SLTP tidak menunjukkan perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan

perempuan tidak lagi menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan. Artinya, kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

C. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SLTP, pada tahun 2016 APM SLTA Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 APM SLTA mencapai 59,47 persen, meningkat menjadi 59,57 persen di tahun 2016. Meskipun APM SLTA terendah dibandingkan APM kelompok lainnya, namun peningkatan APM SLTA ini dapat menggambarkan peningkatan pencapaian program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

4.2. ANGKA BUTA HURUF

Angka Buta Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

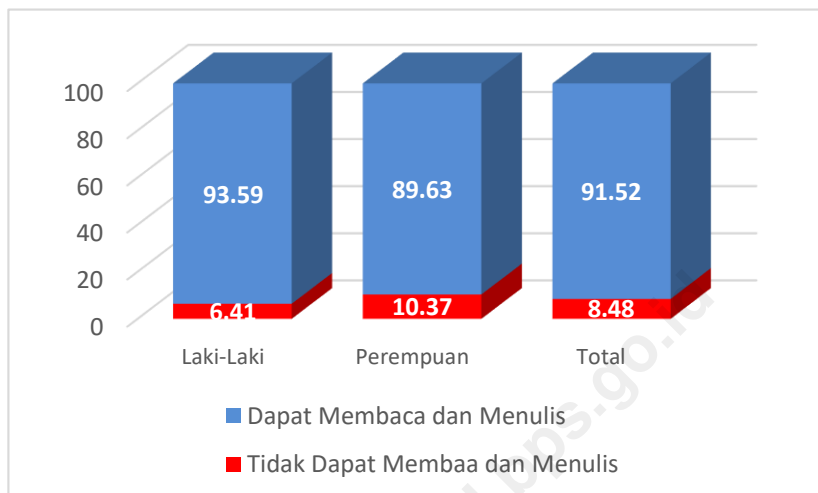
Negara Indonesia sendiri telah ikut serta menandatangani MDGs (*Milenium Development Goals*) yang di luncurkan oleh *United Nation* (PBB). Salah satu tujuannya adalah pada tahun 2015 diharapkan buta aksara di kalangan marginal dapat dikurangi minimal menjadi 50 persen. Sebagai bagian dari dunia global, Sulawesi Selatan juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2016 tercatat penduduk Sulawesi Selatan yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 91,52 persen. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 8,48 persen.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Pada tahun 2016, sebanyak 8,48 persen penduduk Sulawesi Selatan usia 15 tahun ke atas masih buta huruf. Pada Gambar 3 tersaji potret penduduk Sulawesi Selatan usia 15 tahun ke atas menurut kemampuan baca tulis dan jenis kelamin tahun 2016.

Gambar 3
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber: Susenas 2016

Bila dilihat menurut gender, buta huruf kaum perempuan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Angka buta huruf perempuan tahun 2016 sebesar 10,37 persen sedangkan angka buta huruf laki-laki hanya 6,41 persen. Keadaan ini perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Sulawesi Selatan. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan komitmen MDG'S dapat terwujud tuntas di tahun 2016.

Dalam Tabel 5, menjelaskan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis. Pada tabel tersebut nampak bahwa ada tiga kabupaten yang mempunyai persentase penduduk yang tidak mampu membaca dan menulis paling besar yaitu Kabupaten Bantaeng (15,55 persen), Takalar (15,06 persen dan Jeneponto (14,81 persen). Sementara persentase

terkecil penduduk yang tidak mampu membaca dan menulis terdapat di Kota Makassar yaitu 1,14 persen.

Tabel 5
Perentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis,
Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

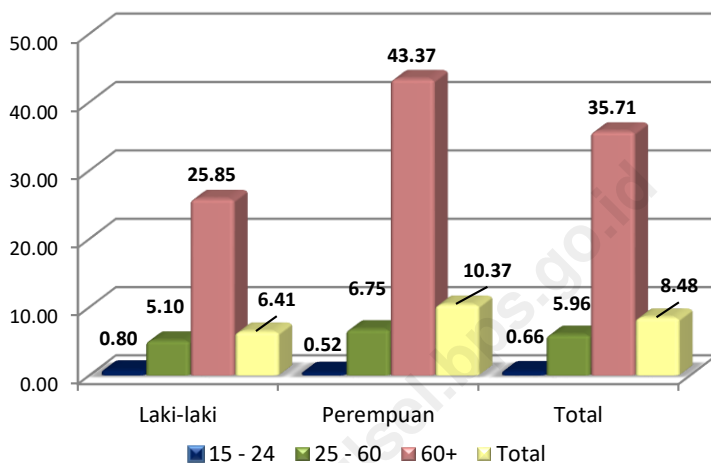
Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Dapat membaca	Tidak	Dapat membaca	Tidak	Dapat membaca	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Selayar	94,73	5,27	88,72	11,28	91,58	8,42
Bulukumba	93,63	6,37	90,24	9,76	91,8	8,20
Bantaeng	86,82	13,18	82,35	17,65	84,45	15,55
Jeneponto	88,62	11,38	82,10	17,90	85,19	14,81
Takalar	87,43	12,57	82,77	17,23	84,94	15,06
Gowa	91,45	8,55	89,10	10,90	90,22	9,78
Sinjai	90,84	9,16	87,69	12,31	89,19	10,81
Maros	93,31	6,69	87,30	12,70	90,17	9,83
Pangkajene dan Kepulauan	91,82	8,18	86,88	13,12	89,23	10,77
Barru	89,32	10,68	89,85	10,15	89,6	10,40
Bone	91,51	8,49	86,13	13,87	88,62	11,38
Soppeng	89,64	10,36	87,81	12,19	88,64	11,36
Wajo	91,03	8,97	84,24	15,76	87,44	12,56
Sidenreng Rappang	93,38	6,62	89,34	10,66	91,29	8,71
Pinrang	93,50	6,50	89,67	10,33	91,47	8,53
Enrekang	94,89	5,11	90,29	9,71	92,59	7,41
Luwu	94,87	5,13	91,54	8,46	93,14	6,86
Tana Toraja	92,90	7,10	87,69	12,31	90,29	9,71
Luwu Utara	94,87	5,13	91,02	8,98	92,91	7,09
Luwu Timur	96,79	3,21	91,23	8,77	94,06	5,94
Toraja Utara	91,77	8,23	82,53	17,47	87,17	12,83
Makassar	99,37	0,63	98,36	1,64	98,86	1,14
Pare Pare	98,37	1,63	94,71	5,29	96,48	3,52
Palopo	98,05	1,95	95,28	4,72	96,61	3,39
Sulsel	93,59	6,41	89,63	10,37	91,52	8,48

Sumber : Susenas 2016

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Angka buta huruf di masing-masing kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Gambar 4 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-

24 tahun), kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas), di Sulawesi Selatan tahun 2015.

Gambar 4
 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur,
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber: Susenas 2016

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok umur 60 tahun keatas atau pada kelompok lansia. Secara total laki-laki dan perempuan, sebesar 35,71 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Sedangkan untuk kelompok lain, kelompok dewasa terdapat 5,96 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok umur remaja hanya sebesar 0,66 persen saja yang buta aksara. Jika dilihat perkembangannya, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta aksara dari tahun ke tahun cenderung menurun, baik itu dari kelompok penduduk remaja, dewasa, maupun lansia. Dilihat sisi gender, di semua kelompok umur, buta huruf perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meski sudah dilakukan program pengentasan, tetapi buta huruf perempuan masih tetap tinggi. Ini terjadi karena kebanyakan

perempuan di desa sibuk dengan urusan rumah tangga sehingga waktunya menjadi terbatas untuk mengikuti pendidikan. Jika dilihat lebih rinci, di kelompok umur remaja selisih buta huruf perempuan dengan laki-laki hampir tidak terlihat. Menurunnya perbedaan gender dan kecilnya angka buta huruf di usia remaja menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan dan semakin menipisnya bias gender di masyarakat.

Tabel 6
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Golongan Umur Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	15-24	25-59	60+	15-24	25-59	65+	15-24	25-59	65+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Selayar	1,91	3,00	20,62	1,27	4,15	48,24	1,63	3,62	36,36
Bulukumba	0,47	5,26	20,97	1,16	4,19	43,65	0,83	4,68	34,09
Bantaeng	0,41	12,76	44,86	1,65	15,61	60,69	1,06	14,27	53,73
Jeneponto	1,77	10,93	35,82	-	15,36	59,39	0,91	13,30	49,17
Takalar	1,27	12,14	41,73	1,10	13,26	60,62	1,18	12,74	53,07
Gowa	1,00	7,19	34,78	-	8,04	48,14	0,47	7,62	42,29
Sinjai	-	6,40	38,43	0,35	6,78	48,34	0,17	6,60	44,18
Maros	0,63	4,95	32,87	0,43	10,10	50,67	0,53	7,64	42,91
Pangkajene dan Kepulauan	1,27	6,25	36,17	-	9,52	53,09	0,65	7,99	45,90
Barru	-	9,56	32,01	0,45	6,82	32,66	0,21	8,07	32,38
Bone	0,32	5,84	34,01	0,93	7,70	50,73	0,60	6,87	43,73
Soppeng	0,81	7,50	30,10	1,47	4,50	43,94	1,14	5,85	37,99
Wajo	0,49	7,00	33,29	1,94	10,19	56,78	1,19	8,71	46,53
Sidenreng Rappang	0,51	3,86	31,06	-	6,28	42,94	0,26	5,11	37,72
Pinrang	0,59	4,06	28,79	-	5,42	45,34	0,28	4,77	38,20
Enrekang	0,86	3,92	17,38	-	4,82	37,37	0,50	4,38	28,33
Luwu	1,29	3,77	20,50	0,47	5,04	39,42	0,88	4,43	30,80
Tana Toraja	2,95	5,87	18,91	1,29	8,83	38,13	2,17	7,36	29,31
Luwu Utara	1,72	4,02	17,71	0,90	6,38	39,24	1,28	5,19	28,74
Luwu Timur	3,17	1,68	14,45	-	6,58	44,32	1,49	4,03	29,07
Toraja Utara	0,40	7,99	23,09	0,52	13,15	53,68	0,46	10,62	39,31
Makassar	0,37	0,76	0,68	-	0,84	11,87	0,20	0,80	6,97
Pare Pare	-	1,20	9,03	-	3,42	26,69	-	2,32	19,21
Palopo	-	1,08	15,99	2,14	3,10	22,86	1,11	2,12	19,89
Sulsel	0,80	5,10	25,85	0,52	6,75	43,37	0,66	5,96	35,71

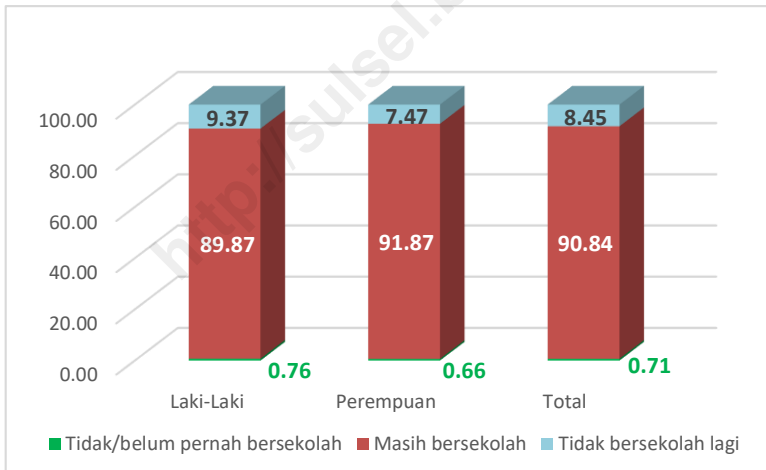
Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>)

Keterangan : **N** = Negeri, **S** = Swasta

4.3. PENDUDUK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan kedalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program kearah tersebut. Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan adalah dengan melaksanakan program pembangunan pendidikan untuk semua (*Education for All*/EFA). Program EFA diarahkan pada upaya-upaya memberikan pendidikan secara terus menerus kepada semua penduduk usia 7 hingga 18 tahun sehingga diharapkan tidak ada penduduk di usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

Gambar 5
Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber: Susenas 2016

Pada tahun 2016, tercatat penduduk yang masih mengenyam bangku pendidikan usia 7-18 tahun yang masih bersekolah sebesar 90,84 persen. Namun demikian, pada tahun 2016 masih terdapat penduduk Sulawesi Selatan usia 7-18 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 0,71 persen. Jika

dilihat berdasarkan gender, penduduk usia 7-18 tahun yang tergolong dalam kategori tidak sekolah selalu lebih tinggi pada kelompok laki-laki dibandingkan perempuan, meskipun perbedaan ini menurun dibandingkan tahun 2016. (Lihat Gambar 5)

Dilihat dari sebaran wilayahnya, tergambar bahwa persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Tabel 7 menunjukkan bahwa di daerah pedesaan persentase penduduk yang tidak pernah/belum sekolah dan tidak bersekolah lagi tercatat sebesar 9,70 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang mencapai 8,26 persen. Tingginya penduduk yang tidak bersekolah di daerah pedesaan dimungkinkan disebabkan oleh program-program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah lebih menunjukkan hasil di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Tabel 7
Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah,
Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Partisipasi Sekolah	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0,86	0,76	0,81	0,70	0,60	0,65	0,76	0,66	0,71
2. Masih sekolah	91,06	92,47	91,74	89,16	91,52	90,30	89,87	91,87	90,84
3. Tidak bersekolah lagi	8,08	6,77	7,45	10,14	7,88	9,05	9,37	7,47	8,45
4. Jumlah 1 dan 3	8,94	7,53	8,26	10,84	8,48	9,70	10,13	8,13	9,16

Sumber: Susenas 2016

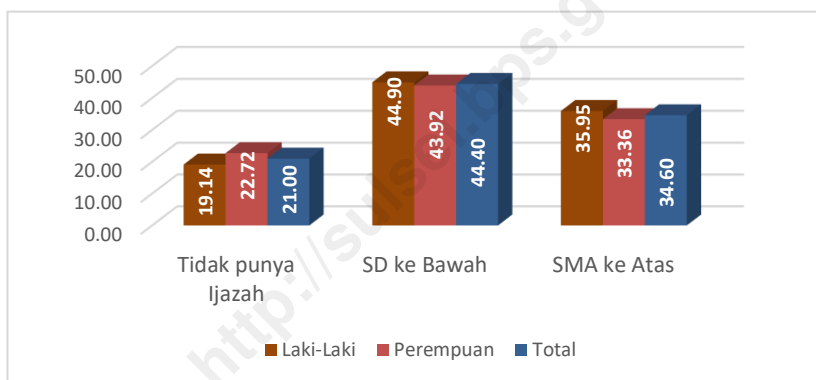
4.4. TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Tahun 2016 persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Sulawesi Selatan terbanyak berada pada kategori SLTP ke bawah, yaitu sebesar 44,40 persen, dan terkecil pada kategori tidak punya ijazah, sebesar 21,00 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil persentase penduduk yang

menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Komposisi ini menunjukkan kurang baiknya kualitas SDM penduduk Sulawesi Selatan di tahun 2016.

Dari sudut pandang gender, perlu diperhatikan bahwa masih ada tendensi diskriminatif terhadap kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. Ketimpangan pemerataan tingkat pendidikan yang ditamatkan perempuan hanya unggul pada tingkat pendidikan SLTP ke bawah saja. Ditingkat SLTA ke atas tingkat pendidikan kaum perempuan berada di bawah laki-laki. Pola semacam ini terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6
 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut
 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin,
 Di Provinsi Sulawesi Selatan 2016



Sumber: Susenas 2016

4.5. FASILITAS PENDIDIKAN DAN JUMLAH SISWA

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikinya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Pada Tabel 8, menunjukkan jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tabel 8, terlihat bahwa jumlah sekolah negeri dan swasta tingkat SD/MI sebesar 7.134 buah, SMP/MTs berjumlah 2.430 buah dan sekolah SMA/MA/SMK berjumlah 1.432 buah. Bila diamati lebih jauh table 6, jumlah

sekolah SD/MI yang paling banyak ada di Kabupaten Bone sebesar 767 buah sedang Kota Palopo merupakan daerah yang memiliki jumlah sekolah SD/MI paling sedikit yaitu sebesar 80 buah. Kabupaten/kota yang jumlah sekolah SMP/MTs paling banyak adalah Kota Makassar sebesar 258 buah dan Kota Palopo mempunyai jumlah sekolah SMP/MTs paling sedikit yaitu 30 buah. Jumlah sekolah setingkat sekolah menengah atas yang paling banyak terdapat di Kota Makassar yaitu sebesar 147 buah yang terdiri dari sekolah SMA/MA sebanyak 159 buah dan SMK sebanyak 88 buah. Sedang Kabupaten Selayar mempunyai jumlah sekolah setingkat sekolah menengah atas yang paling sedikit yaitu sebanyak 21 buah terdiri dari SMA/MA (12 buah) dan SMK (9 buah).

Pada Tabel 9, memperlihatkan jumlah pendidik/guru menurut tingkat pendidikan dan kabupaten/kota. Jumlah pendidik/guru tingkat SD/MI di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 71.752 orang terdiri dari 38.499 orang guru SD negeri dan 3.253 orang guru SD swasta. Kota Makassar mempunyai tenaga pendidik yang paling banyak yaitu 6.903 orang, sedang Kota Palopo adalah yang mempunyai tenaga pendidik paling sedikit yaitu 1.155 orang. Tenaga pendidik untuk tingkat sekolah pertama di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 28.995 orang yang terdiri dari untuk SMP negeri sebanyak 25.065 orang dan Swasta sebanyak 3.930 orang. Tenaga pendidik tingkat SMP paling banyak terdapat di Kota Makassar 3.586 orang sementara Kabupaten Bantaeng mempunyai tenaga pendidik setingkat SMP yang paling sedikit yaitu 580 orang.

Dalam Tabel 9, juga memperlihatkan jumlah tenaga pendidik setingkat SMA dan SMK. Di provinsi Sulawesi Selatan jumlah tenaga pendidik setingkat SMA sebanyak 15.018 orang terdiri dari SMA Negeri (12.267 orang) dan SMA swasta (2.751 orang). Tenaga pendidik setingkat SMA yang paling banyak terdapat di Kota Makassar sebanyak 2.339 orang sementara yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Selayar yaitu 293 orang. Sementara untuk tenaga pendidik setingkat SMK jumlah terbanyak terdapat di Kota Makassar yaitu sebanyak 1.775 orang dan yang paling sedikit jumlahnya terdapat di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 113 orang.

Tabel 8
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Dan kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA			SMK			Total
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kepulauan Selayar	143	10	153	50	14	64	10	2	12	8	1	9	238
Bulukumba	355	32	387	70	43	113	21	20	41	11	11	22	563
Bantaeng	146	22	168	26	42	68	7	20	27	5	6	11	274
Jeneponto	289	41	330	69	67	136	15	51	66	10	10	20	552
Takalar	236	14	250	38	31	69	13	25	38	7	3	10	367
Gowa	400	94	494	82	95	177	23	62	85	5	14	19	775
Sinjai	243	28	271	44	37	81	16	25	41	4	7	11	404
Maros	248	43	291	45	76	121	14	43	57	2	18	20	489
Pangkajene dan Kepulauan	300	10	310	80	30	110	26	23	49	9	5	14	483
Barru	198	26	224	35	19	54	8	14	22	5	3	8	308
Bone	672	95	767	118	97	215	34	45	79	9	14	23	1085
Soppeng	255	31	286	32	48	80	10	10	20	5	7	12	398
Wajo	385	51	436	71	35	106	16	15	31	9	7	16	589
Sidenreng Rappang	230	18	248	45	31	76	12	20	32	8	4	12	368
Pinrang	316	35	351	53	25	78	12	11	23	10	6	16	468
Enrekang	219	20	239	43	25	68	13	14	27	5	3	8	342
Luwu	260	56	316	80	65	145	20	23	43	13	11	24	528
Tana Toraja	214	14	228	65	23	88	14	7	21	4	25	29	366
Luwu Utara	245	26	271	71	49	120	20	19	39	8	5	13	443
Luwu Timur	151	29	180	31	32	63	14	14	28	2	2	4	275
Toraja Utara	181	9	190	65	12	77	9	7	16	5	18	23	306
Makassar	364	201	565	46	212	258	26	133	159	13	75	88	1070
Pare Pare	80	19	99	14	19	33	7	11	18	3	10	13	163
Palopo	65	15	80	15	15	30	7	6	13	7	13	20	143
Sulsel	6 195	939	7 134	1 288	1 142	2 430	367	620	987	167	278	445	10 997

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>)

Keterangan : **N** = Negeri, **S** = Swasta

Tabel 9
Jumlah Pendidik Menurut Tingkat Pendidikan Dan kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA			SMK			Total
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kepulauan Selayar	1 752	6	1 758	707	49	756	259	34	293	241	1	242	3 049
Bulukumba	3 643	13	3 656	1 340	80	1 420	726	44	770	316	129	445	6 291
Bantaeng	2 355	20	2 375	478	102	580	297	23	320	226	52	278	3 553
Jeneponto	2 789	23	2 812	937	42	979	564	66	630	299	48	347	4 768
Takalar	3 297	29	3 326	1 081	61	1 142	423	87	510	283	82	365	5 343
Gowa	4 457	177	4 634	1 562	335	1 897	741	314	1 055	353	218	571	8 157
Sinjai	2 706	25	2 731	922	8	930	563	23	586	187	74	261	4 508
Maros	2 518	177	2 695	896	251	1 147	447	138	585	94	184	278	4 705
Pangkajene dan Kepulauan	3 151	25	3 176	1 280	119	1 399	568	96	664	345	74	419	5 658
Barru	2 141	-	2 141	761	39	800	268	30	298	224	22	246	3 485
Bone	6 081	61	6 142	2 039	71	2 110	1 084	53	1 137	350	118	468	9 857
Soppeng	2 692	18	2 710	740	101	841	361	28	389	227	144	371	4 311
Wajo	3 580	109	3 689	1 098	36	1 134	545	25	570	208	60	268	5 661
Sidenreng Rappang	2 272	32	2 304	941	51	992	406	46	452	311	48	359	4 107
Pinrang	3 328	69	3 397	1 204	32	1 236	418	39	457	469	76	545	5 635
Enrekang	2 515	11	2 526	835	57	892	443	95	538	193	87	280	4 236
Luwu	3 043	97	3 140	1 375	198	1 573	644	54	698	356	115	471	5 882
Tana Toraja	2 228	105	2 333	948	213	1 161	354	77	431	162	347	509	4 434
Luwu Utara	2 753	-	2 753	1 157	20	1 177	598	-	598	260	50	310	4 838
Luwu Timur	1 852	143	1 995	726	103	829	474	72	546	91	22	113	3 483
Toraja Utara	2 102	103	2 205	1 128	109	1 237	306	116	422	234	298	532	4 396
Makassar	5 153	1 750	6 903	1 910	1 676	3 586	1 176	1 163	2 339	806	969	1 775	14 603
Pare Pare	1 097	99	1 196	506	79	585	273	42	315	281	118	399	2 495
Palopo	994	161	1 155	494	98	592	329	86	415	353	170	523	2 685
Sulsel	68 499	3 253	71 752	25 065	3 930	28 995	12 267	2 751	15 018	6 869	3 506	10 375	126 140

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>)

Keterangan : **N** = Negeri, **S** = Swasta

Jumlah murid di Kota Makassar sebanyak 144.065 orang atau sekitar 15,31 dari total murid yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 940.809 orang. Dari jumlah total murid tersebut yang sekolah di SD negeri sebanyak 893.489 orang dan yang sekolah di SD Swasta sebanyak 47.320 orang. (Lihat Tabel 10)

Selain jumlah murid juga dapat diamati jumlah siswa baik setingkat SMP maupun SMA pada Tabel 10. Dalam tabel tersebut, jumlah siswa SMP di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 383.588 orang terdiri dari siswa SMP negeri sebanyak 328.776 orang dan siswa SMP Swasta sebanyak 54.812 orang. Jumlah siswa SMP yang paling banyak terdapat di Kota Makassar yaitu 64.697 orang dan Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang paling sedikit jumlah siswa SMPnya yaitu 5.986 orang.

Bila diamati lebih jauh lagi Tabel 10, juga dapat diketahui jumlah siswa setingkat SMA umum dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah siswa SMA umum di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 230.853 orang terdiri dari 194.676 orang di SMA umum negeri dan 36.177 orang di SMA umum swasta. Populasi siswa SMA umum terbanyak ada di Kota Makassar yaitu 38.606 orang sementara Kabuapten Selayar mempunyai populasi jumlah siswa setingkat SMA umum yaitu 3.237 orang. Sedang jumlah siswa yang sekolah tingkat SMK di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 124.899 orang yang terdiri dari siswa SMK negeri (84.887 orang) dan SMK swasta (40.012 orang). Jumlah siswa terbanyak masih di tempati oleh Kota Makassar (27.035 orang) sedang yang terendah ada di Kabupaten Luwu Timur (1.693 orang).

Tabel 10
Jumlah Murid/Siswa Menurut Tingkat Pendidikan Dan kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA			SMK			Total
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
Kepulauan Selayar	15 844	39	15 883	6 213	384	6 597	2 998	239	3 237	1 731	3	1 734	27 451
Bulukumba	45 815	212	46 027	16 061	381	16 442	11 085	359	11 444	3 161	483	3 644	77 557
Bantaeng	20 638	185	20 823	5 280	706	5 986	3 994	65	4 059	1 923	420	2 343	33 211
Jeneponto	43 605	298	43 903	12 762	683	13 445	6 540	973	7 513	4 537	630	5 167	70 028
Takalar	32 803	220	33 023	12 525	309	12 834	8 702	551	9 253	3 510	269	3 779	58 889
Gowa	72 292	1 935	74 227	25 882	5 101	30 983	14 237	3 116	17 353	5 744	2 636	8 380	130 943
Sinjai	27 199	155	27 354	10 636	81	10 717	7 488	158	7 646	1 806	261	2 067	47 784
Maros	36 987	2 648	39 635	12 251	2 944	15 195	7 297	2 045	9 342	1 801	1 500	3 301	67 473
Pangkajene dan Kepulauan	38 251	479	38 730	13 783	1 558	15 341	6 795	1 021	7 816	4 265	1 038	5 303	67 190
Barru	18 470	-	18 470	8 071	224	8 295	3 802	303	4 105	2 409	103	2 512	33 382
Bone	74 964	774	75 738	27 184	694	27 878	18 268	589	18 857	4 883	928	5 811	128 284
Soppeng	20 680	112	20 792	7 381	1 083	8 464	5 015	352	5 367	2 649	925	3 574	38 197
Wajo	36 234	1 138	37 372	12 455	445	12 900	7 584	112	7 696	2 173	479	2 652	60 620
Sidenreng Rappang	29 926	381	30 307	11 271	444	11 715	5 970	756	6 726	3 019	291	3 310	52 058
Pinrang	40 837	871	41 708	17 372	425	17 797	7 743	513	8 256	6 663	1 117	7 780	75 541
Enrekang	25 283	133	25 416	9 030	759	9 789	5 948	882	6 830	1 688	1 198	2 886	44 921
Luwu	39 967	1 064	41 031	16 053	1 860	17 913	11 200	1 503	12 703	4 218	1 427	5 645	77 292
Tana Toraja	30 733	1 824	32 557	11 786	3 772	15 558	5 084	1 451	6 535	2 302	4 168	6 470	61 120
Luwu Utara	34 068	-	34 068	15 003	159	15 162	10 143	-	10 143	3 118	362	3 480	62 853
Luwu Timur	28 851	2 391	31 242	12 180	1 367	13 547	8 999	980	9 979	1 418	275	1 693	56 461
Toraja Utara	32 146	2 252	34 398	14 317	1 933	16 250	4 898	2 591	7 489	2 820	4 266	7 086	65 223
Makassar	117 361	26 704	144 065	37 132	27 565	64 697	22 122	16 484	38 606	12 414	14 621	27 035	274 403
Pare Pare	14 601	1 025	15 626	6 591	825	7 416	3 726	260	3 986	3 187	944	4 131	31 159
Palopo	15 934	2 480	18 414	7 557	1 110	8 667	5 038	874	5 912	3 448	1 668	5 116	38 109
Sulsel	893 489	47 320	940 809	328 776	54 812	383 588	194 676	36 177	230 853	84 887	40 012	124 899	1 680 149

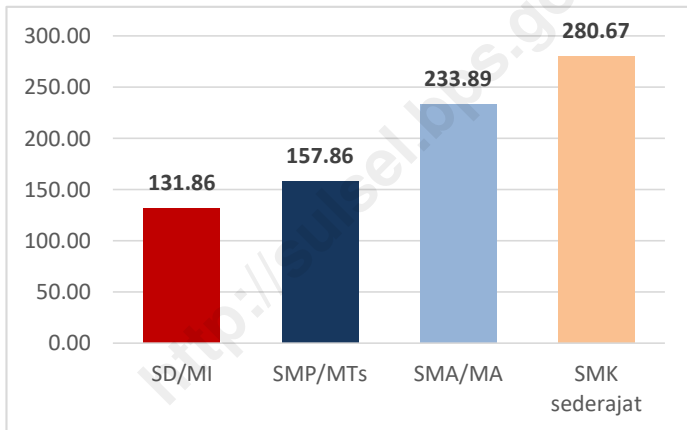
Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>)

Keterangan : **N** = Negeri, **S** = Swasta

4.6. RASIO MURID/SISWA TERHADAP SEKOLAH DAN GURU

Pada Gambar 7, memperlihatkan rasio murid terhadap sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Rasio murid terhadap sekolah Dasar Selatan tahun 2016 mencapai 131,86 murid per sekolah. Sedang untuk rasio siswa SMP terhadap sekolah mencapai 157,86 siswa per sekolah dan rasio siswa SMA umum terhadap sekolah sekitar 233,89 siswa per sekolah serta rasio SMK terhadap sekolah mencapai 280,67 siswa per sekolah.

Gambar 7
Rasio Murid/Siswa Terhadap Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber : Tabel 9

Kota Makassar dan Palopo merupakan dua kota yang paling tinggi Rasio murid terhadap sekolah SD yaitu 254,98 dan 230,18. Namun demikian ada empat kabupaten yang rasionya di bawah seratus per sekolah yaitu Kabupaten Bone (98,62 murid per sekolah), Wajo (85,72 murid per sekolah), Barru (82,46 murid per sekolah) dan Soppeng (72,70 murid per sekolah). (Lihat Tabel 11).

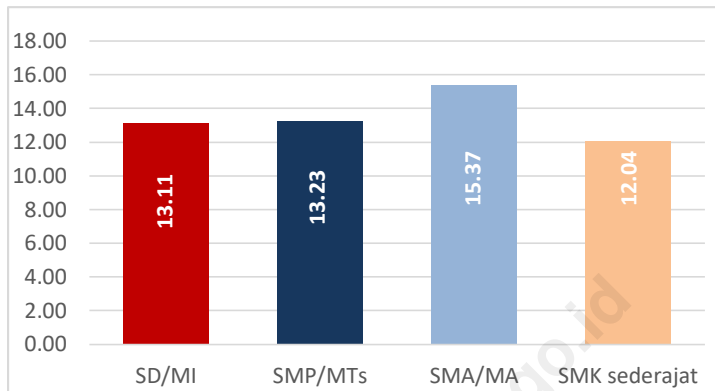
Tabel 11
Rasio Siswa/Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD, SLTP, SLTA dan SMK
Menurut kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Selayar	103,81	103,08	269,75	192,67
Bulukumba	118,93	145,50	279,12	165,64
Bantaeng	123,95	88,03	150,33	213,00
Jeneponto	133,04	98,86	113,83	258,35
Takalar	132,09	186,00	243,50	377,90
Gowa	150,26	175,05	204,15	441,05
Sinjai	100,94	132,31	186,49	187,91
Maros	136,20	125,58	163,89	165,05
Pangkajene dan Kepulauan	124,94	139,46	159,51	378,79
Barru	82,46	153,61	186,59	314,00
Bone	98,62	129,67	238,70	252,65
Soppeng	72,70	105,80	268,35	297,83
Wajo	85,72	121,70	248,26	165,75
Sidenreng Rappang	122,21	154,14	210,19	275,83
Pinrang	118,83	228,17	358,96	486,25
Enrekang	106,34	143,96	252,96	360,75
Luwu	129,84	123,54	295,42	235,21
Tana Toraja	142,79	176,80	311,19	223,10
Luwu Utara	125,71	126,35	260,08	267,69
Luwu Timur	173,57	215,03	356,39	423,25
Toraja Utara	181,04	211,04	468,06	308,09
Makassar	254,98	250,76	242,81	307,22
Pare Pare	157,84	224,73	221,44	317,77
Palopo	230,18	288,90	454,77	255,80
Sulsel	131,86	157,86	233,89	280,67

Sumber : Tabel 8 dan Tabel 10

Sedang untuk rasio siswa setingkat SMP terhadap sekolah rata-rata mencapai di atas 100 per sekolah kecuali dua kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto (98,86 siswa per sekolah) dan Bantaeng (88,03 siswa per sekolah). Rasio siswa SMP terhadap sekolah yang paling tinggi terdapat di Kota Palopo yaitu sekitar 288,90 siswa per sekolah. Untuk rasio siswa SMA umum terhadap sekolah sebagian besar kabuten/kota mencapai sekitar 200 siswa per sekolah begitu pula ratio siswa SMK terhadap sekolah bahkan ada tiga kabupaten mencapai kisaran 400 siswa per sekolah yaitu Kabupaten Pinrang, Luwu Timur dan Gowa. (Lihat Tabel 11)

Gambar 8
Rasio Murid/Siswa Terhadap Guru Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber : Tabel 11

Pada Gambar 8, memperlihatkan rasio siswa/murid terhadap guru menurut tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jika diamati Gambar 8, nampak bahwa rasio murid/siswa SD sampai SMA/SMK sekitar 12-15 siswa/murid.

Rasio murid SD terhadap guru Kota Makassar mencapai rasio tertinggi yaitu sekitar 20,87 murid per guru sedang rasio yang terendah ada di Kabupaten Soppeng sekitar 7,63 murid per guru. Untuk rasio murid terhadap guru setingkat SMP rata-rata rasionya di atas 10 siswa per guru kecuali Kabupaten Selayar yang hanya 8 siswa per guru. Sementara rasio siswa SMA terhadap guru di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 berkisar 11-18 siswa per guru. Sedang rasio siswa terhadap guru di tingkat SMK menurut kabupaten/kota sebagian besar di atas 10 siswa per guru kecuali tujuh kabupaten yang di bawah 10 siswa per guru bahkan ada 2 kabupaten yang hanya sekitar tujuh siswa per guru yaitu Kabupaten Selayar dan Sinjai. (Lihat Tabel 12)

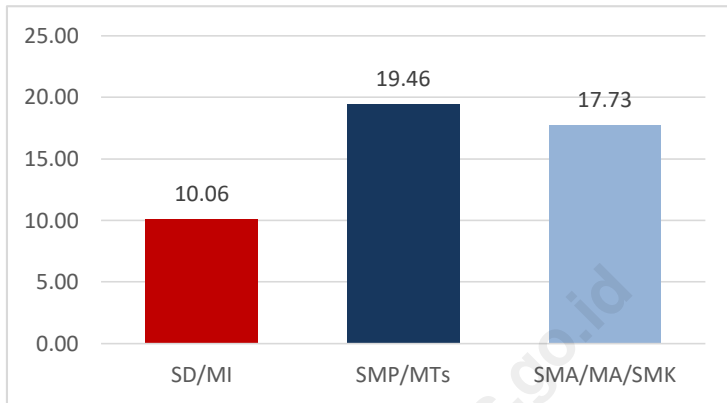
Tabel 12
Rasio Siswa/Murid Terhadap Guru Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK
Menurut kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Selayar	9,03	8,73	11,05	7,17
Bulukumba	12,59	11,58	14,86	8,19
Bantaeng	8,77	10,32	12,68	8,43
Jeneponto	15,61	13,73	11,93	14,89
Takalar	9,93	11,24	18,14	10,35
Gowa	16,02	16,33	16,45	14,68
Sinjai	10,02	11,52	13,05	7,92
Maros	14,71	13,25	15,97	11,87
Pangkajene dan Kepulauan	12,19	10,97	11,77	12,66
Barru	8,63	10,37	13,78	10,21
Bone	12,33	13,21	16,58	12,42
Soppeng	7,67	10,06	13,80	9,63
Wajo	10,13	11,38	13,50	9,90
Sidenreng Rappang	13,15	11,81	14,88	9,22
Pinrang	12,28	14,40	18,07	14,28
Enrekang	10,06	10,97	12,70	10,31
Luwu	13,07	11,39	18,20	11,99
Tana Toraja	13,95	13,40	15,16	12,71
Luwu Utara	12,37	12,88	16,96	11,23
Luwu Timur	15,66	16,34	18,28	14,98
Toraja Utara	15,60	13,14	17,75	13,32
Makassar	20,87	18,04	16,51	15,23
Pare Pare	13,07	12,68	12,65	10,35
Palopo	15,94	14,64	14,25	9,78
Sulsel	13,11	13,23	15,37	12,04

Sumber : Tabel 9 dan Tabel 10

Pada Gambar 9, memperlihatkan bahwa rasio guru terhadap jumlah sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 menurut jenjang pendidikan. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa rasio guru terhadap sekolah di jenjang SD hanya sekitar 10 guru setiap sekolah sementara di jenjang SMP rasionya sekitar 19 guru setiap sekolah dan di jenjang SMA sederajat sekitar 17 guru per sekolah.

Gambar 9
Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber : Tabel 11

Sementara jika dilihat Tabel 13, dapat dilihat rasio guru terhadap sekolah menurut jenjang pendidikan dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Pada tersebut nampak bahwa rasio guru terhadap sekolah untuk jenjang pendidikan SD tertinggi terdapat di Kota Palopo yaitu 14 guru per sekolah sedang yang terendah rasionya diduduki oleh Kabupaten Bone sekitar 8 guru per sekolah. Sementara untuk tingkat SMP sederajat rasio guru terhadap sekolah tertinggi ada di Kota Makassar sekitar 41 guru per sekolah dan yang terendah terdapat di Kabupaten 13 guru per sekolah. Pada tingkat SMA sederajat ratio guru terhadap sekolah yang tertinggi terdapat di Kota Palopo sekitar 28 guru per sekolah dan yang terendah ada di Kabupaten Jeneponto dan Maros masing-masing sekitar 11 guru per sekolah.

Tabel 13
 Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA Sederajat
 Menurut kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	11,49	14,14	25,48
Bulukumba	9,45	19,14	19,29
Bantaeng	14,14	18,38	15,74
Jeneponto	8,52	13,58	11,36
Takalar	13,30	28,45	18,23
Gowa	9,38	19,05	15,63
Sinjai	10,08	20,95	16,29
Maros	9,26	19,91	11,21
Pangkajene dan Kepulauan	10,25	16,00	17,19
Barru	9,56	21,74	18,13
Bone	8,00	17,28	15,74
Soppeng	9,48	23,13	23,75
Wajo	8,46	15,46	17,83
Sidenreng Rappang	9,29	20,91	18,43
Pinrang	9,68	22,72	25,69
Enrekang	10,57	19,42	23,37
Luwu	9,94	17,19	17,45
Tana Toraja	10,23	14,58	18,80
Luwu Utara	10,16	16,30	17,46
Luwu Timur	11,08	23,42	20,59
Toraja Utara	11,61	17,35	24,46
Makassar	12,22	41,52	16,66
Pare Pare	12,08	36,14	23,03
Palopo	14,44	32,93	28,42
Sulsel	10,06	19,46	17,73

Sumber : Tabel 8 dan Tabel 9

BAB V

PENUTUP



5.1. Kesimpulan

Dari hasil kajian data susenas 2016 sebelumnya, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (5-6 tahun) baru mencapai 41,70 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kabupaten yang capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata-rata Sulawesi Selatan.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA) di Provinsi Sulawesi Selatan, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah dari penduduk laki-laki.
3. Hingga tahun 2016 masih terdapat 8,48 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Sulawesi Selatan.
4. Di Sulawesi Selatan masih ada sekitar 9,16 persen dari penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah. Dilihat dari segi gender, persentase penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lebih banyak dibandingkan perempuan.

-
5. Kualitas SDM penduduk Sulawesi Selatan tahun 2016 kurang baik, hal ini terlihat dengan semakin rendahnya kategori jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka semakin kecil persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut.

<http://sulsesel.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No. 6 Makassar, 90125 Telp. 0411-854838, Fax. 0411-851225
e-mail: sulsel@bps.go.id, website :<http://sulsel.bps.go.id>